



**Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan**  
**Volume 12/Nomor-1/April/2019**

**ISSN : 2302-1322**

## **ANALISIS TREN PAJAK DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013-2016 (STUDI KASUS DI BPPKAD KOTA SURAKARTA)**

**Dian Aisyah <sup>1</sup>**

Universitas Setia Budi Surakarta  
(dianaisyah90@gmail.com)

**Eko Madyo Sutanto <sup>2</sup>**

Universitas Setia Budi Surakarta

**Titiek Puji Astuti <sup>3</sup>**

Universitas Setia Budi Surakarta

### **ABSTRAK**

*Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tren peningkatan pajak daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2013-2016. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Dokumentasi, menggunakan uji analisis Tren. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yang menggunakan data sekunder berupa pajak daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016. Hasil dari pengolahan data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Terdapat Tren terhadap peningkatan pajak daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016. Hal tersebut pastinya akan mempengaruhi tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dikarenakan jumlah pendapatan daerah yang mengalami kenaikan. Pada beberapa pajak daerah masih mengalami penurunan namun tidak terlalu mempengaruhi peningkatan pajak daerah Kota Surakarta.*

*Kata Kunci : Tren, Pajak Daerah, Kota Surakarta.*

### **A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik penerimaan langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik dibidang kenegaraan maupun bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah

ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Pentingnya pajak tersebut untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari selain sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan untuk merasa aman dan terlindungi (Wulansepti, 2014).

Pembangunan nasional di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang berlandaskan keadilan dan kemakmuran. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat



yang merata pembangunan nasional tidaklah terlepas dari adanya pembangunan daerah. Di masa sekarang ini, Indonesia telah menerapkan sistem pemerintah otonomi daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah, baik yang digunakan untuk pemerintah maupun untuk pembangunan (Lintang, 2014). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai dengan batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota dan kebijakan pemungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif tanah dan bangunan.

Sama halnya dengan daerah lain Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang di berikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Surakarta diharapkan

mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan kelangsungan dan kemajuan. Apabila potensi sumber ekonomi Kota Surakarta terus dikembangkan dan ditingkatkan, maka nantinya mampu meningkatkan citra daerah. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah menyebutkan sumber-sumber pajak daerah Kota Surakarta sebagai berikut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet, sedangkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010.

Dari penjelasan latar belakang terdapat beberapa fenomena yang terjadi seperti pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan mengalami kesulitan memenuhi target pendapatan pajak hotel tahun anggaran 2015. Sekretaris DPPKAD Pemkot Surakarta Breta Sri Hudiningsih di Solo menyatakan realisasi pendapatan pajak hotel hingga akhir November 2015 baru mencapai 77,57% dari total target sebesar Rp 22.372.597.000. Ia mengatakan kesulitan menggenjot pajak hotel di sisa waktu tutup anggaran 2015 yang tinggal sebulan lagi. Breta mengatakan pemkot tetap menaikkan target penerimaan pajak hotel pada tahun depan meskipun untuk target tahun ini diprediksikan sulit dicapai. Namun pihaknya tidak menyebutkan besaran kenaikan target pendapatan pajak hotel tersebut. Target



pendapatan pajak hotel, pendapatan pajak lainnya juga belum tercapai 100%, diantaranya pajak hiburan, pajak sarang burung walet dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Isnanto, 2016).

Pada tahun ini Pemerintah (Pemkot) Kota Surakarta menaikkan target 10 sektor pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta pada tahun 2017. Pasalnya penerimaan pajak pada tahun 2016 lalu sanggup terealisasi, bahkan ada yang melebihi target. Kesepuluh sektor pajak itu, yakni pajak hotel dengan besaran Rp 24 miliar, pajak restoran sebesar Rp 28,2 miliar, pajak hiburan sebesar Rp 8,5 miliar, pajak parkir sebesar Rp 3,3 miliar, pajak penerangan jalan sebesar Rp 53 miliar, pajak air tanah sebesar Rp 1,2 miliar, pajak sarang burung walet sebesar Rp 67 miliar, pajak BPHTB sebesar Rp 67 miliar, dan PBB sebesar Rp 59 miliar. Jumlah pajak restoran mendapat perhatian serius, karena tahun lalu pendapatan dari pajak restoran mampu melampaui target, yakni mencapai Rp 31 miliar. Untuk pajak restoran itu 10 persen dari hasil omzet yang dicapai oleh restoran "total target dari kesepuluh pajak itu sekitar Rp 255,2 miliar (Prihandika, 2017).

Sayangbati, Debby, dan George (2016) dalam penelitiannya yang berjudul analisis kontribusi dan tren penerimaan pajak daerah, retribusi daerah pada pendapatan asli daerah studi pada kabupaten Minahasa Utara Periode Tahun 2007-2013 Hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif statistik menunjukkan bahwa pajak daerah kontribusinya semakin meningkat dan penerimaannya mengalami tren peningkatan dengan yang menunjukkan penerimaan pajak

daerah akan mengalami peningkatan dengan cepat, sedangkan retribusi daerah kontribusinya semakin menurun dan tren penerimaannya juga semakin menurun.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris adalah Untuk mengetahui tren penerimaan pajak daerah Kota Surakarta tahun 2013-2016.

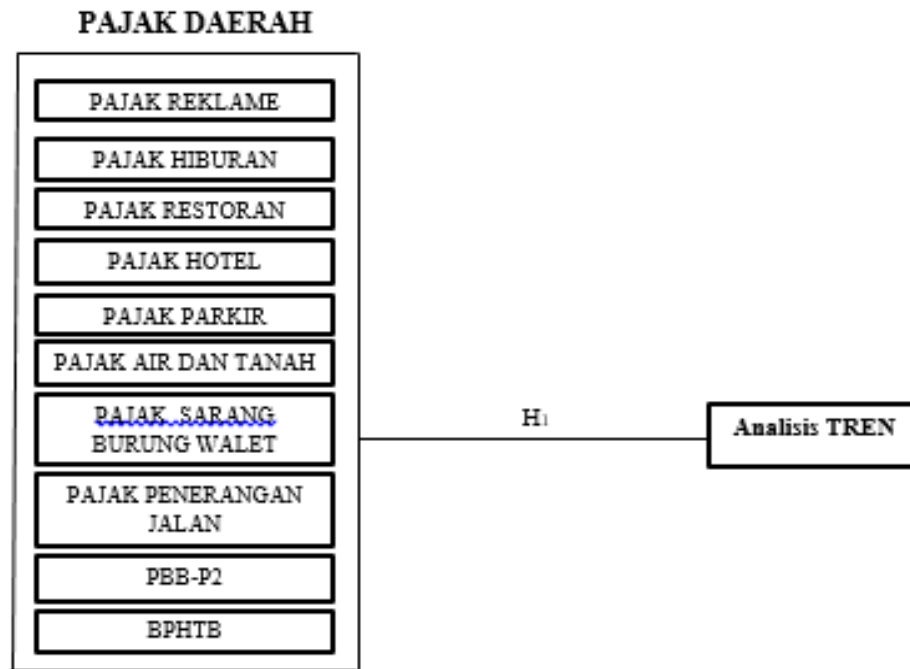
## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah Kota Surakarta terdiri atas (10) pajak daerah yaitu:

- a) Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- b) Pajak restoran pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- c) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan,

- permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
  - e) Pajak penerangan jalan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
  - f) Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
  - g) Pajak air dan tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  - h) Pajak burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah

- satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocaliaesculanta*, dan *collocalia linchi*.
- i) Menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
  - j) Menurut Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.



#### D. METODE PENELITIAN

##### Jenis dan Desain Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan tidak secara langsung atau dengan melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2009). Data sekunder diperoleh dari Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta di Jalan Jend. Sudirman No.2 Surakarta.

##### Populasi, Sampel dan Teknik Penyempelan.

Populasi adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 (sebelas) pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive Sampling*, dimana

*purposive sampling* adalah metode penetapan sample dengan memilih beberapa sampel tertentu yang dinilai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi (Notoatmodjo, 2010). Pemilihan ini ditujukan berdasarkan sejauh mana mereka memahami kondisi sebenarnya daerah objek yang akan diteliti sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) pajak daerah Kota Surakarta menurut Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah.
2. Laporan pajak daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016 data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

### Definisi Operasional Variabel

1. Tren adalah merupakan peramalan suatu variabel dengan variabel bebasnya waktu atau gerakan dari deret berkala selama beberapa tahun dan cenderung menuju pada suatu arah, dimana arahnya dapat naik, mendatar, maupun menurun. Peramalan merupakan penyambungan dari garis tren melewati waktu dari pengamatan terakhir sampai dengan waktu untuk peramalan dibuat.

2. Pajak daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD. 10 pajak daerah tersebut antara lain:

- a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- g. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  - h. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
  - i. Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
3. Target penerimaan pajak daerah adalah angka yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai angka yang harus dicapai oleh penerimaan pajak daerah pada suatu tahun tertentu.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik penumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan teknik yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari catatan atau dokumen pemerintah yaitu laporan pajak daerah yang sudah diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan Daerah. Laporan keuangan pajak daerah yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta pada tahun 2013-2016.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Variabel yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode analisis deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah analisis data dengan menggunakan statistika-statistik univariate seperti rata-rata, median, modus, deviasi standar, varians, dan lain-lain. Menurut Arikunto (2013), metode deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti, Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebaran data sampel atau populasi. Metode analisis deskriptif dipilih berdasarkan skala pengukurannya. Untuk data berskala nominal dan interval, teknik analisis data deskriptif yang bisa dilakukan hanya modus, sementara data

berskala interval dan rasio bisa dilakukan semua teknik analisis data deskriptif.

#### 2. Metode analisis tren

Metode analisis tren adalah merupakan suatu metode analisis statistik yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan yang baik maka, dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis tersebut dapat mengetahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi. Menurut Sunyoto (2011), besar kecilnya perubahan tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi rangkaian waktu (*time series*) dan variabel tertentu, sehingga dapat didefinisikan bahwa Analisis Tren adalah suatu analisis yang menggambarkan atau menunjukkan perubahan rata-rata suatu variabel tertentu dari waktu ke waktu. Perubahan rata-rata suatu variabel yang mengalami cenderung penurunan nilai disebut tren negatif. Perubahan rata-rata suatu variabel yang mengalami peningkatan disebut tren peningkatan.

Secara teoritis, dalam analisis runtun waktu (*time series*) hal yang sangat menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data – data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula estimasi atau peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin dengan jumlah sedikit maka hasuk estimasi atau peramalannya akan semakin jelek. Karena pada dasarnya semakin banyak

**Tabel 4.3. Realisasi Pajak Daerah Kota Surakarta tahun 2013-2016**

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Pajak Hotel	20.423.582.592	21.823.252.020	19.290.768.713	24.931.132.316
2	Pajak Restoran	18.423.246.926	21.972.680.909	24.696.017.859	31.625.753.614
3	Pajak Hiburan	8.999.556.122	9.058.599.351	8.855.102.774	10.576.632.641
4	Pajak Reklame	6.143.112.000	6.501.381.219	8.055.347.900	10.576.632.641
5	Pajak Penerangan Jalan	38.863.518.249	45.144.130.722	49.395.689.510	52.037.144.526
6	Pajak Parkir	2.029.861.115	2.530.723.410	2.871.410.892	3.460.626.000
7	Pajak Air dan Tanah	787.710.400	1.011.284.097	1.133.090.642	1.175.949.600
8	Pajak Sarang Burung Walet	4.474.000	5.033.575	2.098.300	2.384.500
9	PBB-P2	47.333.613.615	50.129.661.474	56.913.587.006	57.884.948.072
10	BPHTB(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunana)	50.897.535.929	48.573.978.435	61.872.290.790	61.820.262.950
	Total	193.906.210.948	206.750.725.212	233.085.404.386	252.052.998.369
	Rata-Rata	19.390.621.095	20.675.072.521	23.308.504.439	25.205.299.837

Sumber: data diolah (2018)

data maka semakin bagus tingkat kesimpulannya (Veno dan Syamsudin, 2016).

Analisis tren dalam penelitian ini, digunakan untuk melihat apakah

kecenderungan potensi dari pajak dan retribusi daerah dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan atau sebaliknya mengalami penurunan.

Rumus:

$$Y = a + bx$$

Penjelasan:

Y= data berkala (time series)=taksiran nilai trend

a=nilai trend pada tahun dasar

b=rata-rata pertumbuhan nilai trend tiap tahun

x=variabel waktu (hari, minggu, bulan dan tahun).

Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada varianbel waktu (x) sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah nol atau  $\sum x = 0$ . Jika nilai x untuk data genap adalah -5,-3,-1,+1,+3,+5 dan untuk data ganjil -3,-2,-1,0,+1,+2,+3.

## E. HASIL PENELITIAN

### Hasil Analisis Tren

Analisis tren dalam penelitian ini, digunakan untuk melihat apakah kecenderungan potensi dari pajak dan retribusi daerah dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan atau sebaliknya mengalami penurunan. Analisis tren ini juga digunakan untuk memproyeksikan atau meramalkan penerimaan pajak daerah Kota Surakarta pada masa yang akan datang.

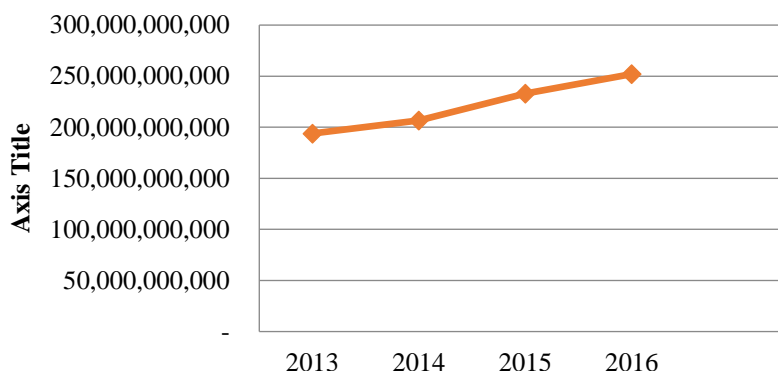
Pajak daerah Kota Surakarta beserta realisasinya tahun 2013-2016 pada Tabel 4.3. Menunjukkan bahwa pajak daerah Kota Surakarta mengalami kenaikan. Kenaikan pajak daerah tersebut secara kumulatif cenderung mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Pada awal tahun penelitian yaitu pada tahun 2013 pajak daerah di Kota Surakarta memperoleh hasil Rp 19.390.621.095 dan berkembang menjadi Rp 20.675.072.521 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 naik menjadi Rp 23.308.504.439 dan pada tahun 2016 Rp 25.205.299.837 atau melebihi 100% selama empat tahun. Pada Tabel 4.3. dapat disimpulkan bahwa sektor yang menyumbang pajak paling tinggi adalah pajak penerangan jalan, pajak bumi dan



bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dan BPHTB memberikan kontribusi dalam

peningkatan pajak daerah di Kota Surakarta pada tahun 2013 dan 2014.

### Grafik Tren Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016



**Gambar 4.1** Grafik Tren Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2016

Dapat dilihat dari Gambar 4.1. bahwa pajak daerah Kota Surakarta secara komulatif mengalami peningkatan di setiap tahunnya, pada awal tahun penelitian yaitu pada tahun 2013 pajak daerah senilai Rp 193.906.210.948 dan meningkat menjadi Rp 206.750.725.212 kemudian tahun 2014 kemudian tahun 2015 naik menjadi Rp223.085.404.386 dan pada tahun 2016 senilai Rp 252.052.998.369 atau

melebihi 100%. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan terdapat tren peningkatan pajak daerah Kota Surakarta.

1. Analisis deret berkala (time series tren) Kecenderungan/perkiraan penerimaan pajak daerah untuk tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel 4.14.

$$Y=a+bx$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum x \cdot y}{\sum x^2}$$

Dimana:

Y = merupakan data berkala (time series) atau taksiran nilai tren

a = nilai rata-rata pada tahun dasar

b =rata-rata pertumbuhan nilai trend disetiap tahunnya.

x =variabel waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun).

Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai yang ditentukan pada variabel waktu (x) sehingga jumlah variabel waktu adalah nol atau  $\sum x = 0$ . Untuk n ganjil maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan, diatas 0 diberi tanda negatife, dibawah diberi tanda positif. Untuk n genap maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu

satuan, diatas 0 diberi tanda negatife dan dibawahnya diberi tanda positif.

Berdasarkan rumusan di atas maka pengerjaan untuk melihat analisis tren pada tahun 2013 hingga 2016 serta prediksi pada tahun yang akan datang yaitu pada tahun 2017 hingga 2020 sebagai berikut:

Tahun	Pajak daerah(Y)	X	x <sup>2</sup>	x.y
2013	193.906.210.948	-3	9	-581.718.632.844
2014	206.750.725.212	-1	1	-206.750.725.212
2015	233.750.725.212	1	1	233.750.725.212
2016	256.056.998.369	3	9	768.158.995.107
n=4	$\sum y = 885.795.338.915$	0	20	$\sum x.y = 213.440.362.263$

Sumber: Data diolah, 2018.

Tabel 4.14 Analisis Trend Pajak Daerah Kota Surakarta

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{885.795.338.915}{4} = 221.448.834.728,75$$

$$b = \frac{\sum x.y}{\sum x^2} = \frac{213.440.362.263}{20} = 10.672.018.113,15$$

setelah mengetahui nilai variabel a dan b maka persamaan tren nya dapat diketahui yaitu:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x$$

Dari persamaan fungsi Y diatas maka nilai tren dari tahun 2016 hingga 2020 dapat diketahui sebagai berikut

Tahun 2017 hingga 2020

Tahun	Y = a + bx	x	Pajak Daerah (Y)
2017	$221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x$	5	274.808.925.294,5
2018	$221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x$	7	296.152.916.520,8
2019	$221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x$	9	317.496.997.747,1
2020	$221.448.834.728,75 + 10.672.018.113,15 x$	11	338.841.033.973,4

Sumber: Data di olah, 2018.

Tabel 4.15 Analisis Tren Pajak Daerah Kota Surakarta

**F. REFERENSI**

- Aosgi. 2017. E-pajak memberikan kemudahan akses Pajak Daerah. Surakarta.go.id/?p=5298. 9(Di akses pada 6 Juni 2018).
- Arief Himmawan DN, Djoko Wahyudi. 2014. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna Mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Volume 21 Nomor 2 Tahun 2014. Universitas Stikubank Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, Devi. 2010. Analisis Tingkat perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKAD) Kota Surakarta Tahun 2005-2009. *Tugas Akhir*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Sipayung, Lia Atmasari. Muindo Renywijoyo, Dwidjaja Agus Susanto. 2014. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB Untuk Meningkatkan Penerimaan Daerah Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. *Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi*, Volume 18 No.2. Hal 1410-3842 Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
- Azhari, Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia* Edisi 1 Cetakan 1. Jakarta Pers. Jakarta
- bppkad.surakarta.go.id
- Budi, Destarika Isnaani Latifah Setyo. 2017. Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah.
- Budiyani, Lina. 2010. Upaya Mengoptimalkan Pajak Daerah Kota Surakarta Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. *Skripsi* Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Cicilia, Sanny. 2015. Surakarta kesulitan capai target pajak hotel, <https://www.gogle.co.id/amp/amp>. [Kontan.co.id/news/](http://Kontan.co.id/news/), diakses pada 25 November 2017).
- Dajan, Anto. 2002. Pengantar Metode Statistik. Cetakan Ke-16, Jakarta: LP3ES.
- Damayanti, RA. 2017. Hubungan Keagenan Pemerintah Daerah dalam Konteks Anggaran: Sebuah Agenda Rekonstruksi. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Departemen Keuangan. 2009. *Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan*, (Online), (<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/ok-pbb/1082-pendaerahan-pbb>), diakses 24 Oktober 2017).

- Dotulong, Garry. A.G., Saerang David P.E. dan Agus T.Poputra. 2014. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasan Utara. Dalam *Jurnal Berkala Efisien Ilmiah*, 14(2):92-107. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Fahrizqi, Anggara. 2010. Faktor – Faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan. *Skripsi*. Semarang. Fakultas Ekonomi UNDIP
- Freddy De Rooy, Nobi Budiarmo. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal ilmiah*, 3(4): 451- 461. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Halim dan Abdullah. 2006. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Hapsari, Meirissa Linda. 2011. Implementasi peralihan bea perolehan Haka atas air tanah dan bangunan pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Surakarta. *Tugas Akhir*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Hariyanti, Widi. 2006. Statistik 1. Universitas Setia Budi Surakarta.
- Haryani. Muhammad Said, Sofyan Syahnur. 2013. Analisis Kotribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan. Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1): ISSN 2302-0172 pp 32-42 Banda Aceh: Universitas Syair Kuala.
- Heryanto, N. 2003. Statistik. Bandung: Pustaka Setia.
- Isnanto, Bayu Ardi. 2016. <http://beritaliputan.com/tiga-setoran-pajak-dki-diprediksi-tak-capai-target/> (Diakses pada Kamis, 12 Oktober 2017)
- Indriantoro, Nur. Bambang Supomo, 2009. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Kurnia Wijaya, Rintis. 2013. Analisis Potensi Pemungutan dan Efektivitas penerimaan Pajak air dan tanah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surakarta. *Tugas Akhir*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Kurotin, Erwin Nur. 2010. Permasalahan dan solusi penarikan pajak restoran di Dinas Pendaoatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. *Tugas Akhir*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Lapian, Pingkan. Grace B. Nangoi, Steven J. Tangkuman. 2015. Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Minahasan. Dalam *Jurnal Ilmiah*, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Larasati, Dian Anggun. 2017. Implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta

- Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Hiburan Penyelenggaraan Kasus Konser Musik Di Hotel Kota Surakarta Tahun 2015-2016). *Skripsi*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Lathifah, N.P. 2010. "Adakah Perilaku Opportunitik Dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik?", *Fokus Ekonomi*. Volume 5(2) :85-94.
- Lianawati, Alfita. 2013. Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam *Economics Development Analysis Journal*. ISSN 2252-6765 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Lupia and McCubbins. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Maria Ngantung, Nancy. 2016. Analisis peran pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah Kota Tomoho. *Jurnal EMBA*. 4(3): 032-043. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Maryati. 2010. *Statistik Ekonomi & Bisnis*. Edisi Revisi Cetakan Kedua. Yogyakarta.
- Monginsidi, Riedel S.M. 2013. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pengelolaan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Dalam *Jurnal EMBA*, 1(4): 2069-2077 Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Mudan. 2003. *Statistik Pendidikan*. Jakarta: Global Pustaka.
- Mustikoarto, Yosafat. 2009. Analisis Penerimaan Pajak Hotel sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah Kota Surakarta. *Skripsi*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Muyassaroh, Ety. 2012. *Perpajakan Brevet A dan B*, Pustaka Yustia, Yogyakarta.
- Ngantung, Nancy Maria. 2016. Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Dalam *Jurnal EMBA*, Volume 4 No. 3 Hal 032-043 Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Novyandra, Rokhim. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental, Revenue, Leverage, Size, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Kota dan Kabupaten dipulau jawa tahun 2014. *Naskah Publikasi* Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Notoatmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Nurrohman, Alfian. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 1994-2007. *Skripsi*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Olivia Vanda NE, Ngadiman dan Nurhasan Hamida. 2014. Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir sebagai

- upaya peningkatan pendapatan asli daerah pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset Kota Surakarta. *Jurnal Penelitian UNS*. 2(3): 284-298. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Putri, Lintang Nahdy. 2014. Peranan Faktor-Faktor yang mempengaruhi peningkatan kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah..Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya.
- Polli, Sumena. 2014. Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado. *Jurnal.EMBA* ISSN: 2302-1174 :751-761.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan.
- Persadha, Wijanto Bagus, Hidayat, Kidarisma, Topowijoyo. 2015. Optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dan kontribusinya terhadap pajak daerah di Kota Surakarta. *Jurnal Adminitrasi Bisnis- Perpajakan (JAB)* Vol.6 Nomor2 Tahun 2015  
Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.  
Universitas Brawijaya.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2006. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII.
- Prihandika, Arum Puspita. 2017. <http://news.ddtc.co.id/artikel/9210/kota-surakarta--target-10-jenis-pajak-naik-kuliner-jadi-andalan/> (Diakses pada Kamis, 12 Oktober 2017).
- Pustikasari, Yunita Dwi, Susilaningsih dan Jaryanto. 2016. Keefektifan dan efisiensi penerimaan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Surakarta. *Jurnal "Tata Arta" UNS*. 2(1): 84-95. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Rahayu, Betty. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Gunung Kidul. *Skripsi*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Rasyid, Harun A. 2002. *Statistik*. Jakarta: Gramedia.
- Ricardo Go, Edward, Julie Sondakh, Heince Wokas. 2013. Analisis penerimaan Retribusi Parkir Kota Manado Tahun 2008-2012, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Hal 26-36. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Riedel S.M. Monginsidi. 2013. Analisis penerimaan pajak penerangan jalan di Dinas Pengelolaan Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasan. *Jurnal EMBA*. 1(4) :2069-

2077. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Sayangbati, Anita, Debby Ch. Rotinsulu, George M.V.Kawung. 2016. Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasan Utara Periode Tahun 2007-2013. *Jurnal berkala ilmiah Efisiensi*. 16(03). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Garafindo Persada. Jakarta.
- Suartana, I Wayan. 2010. "Akuntansi Keperilakuan Teori dan Implementasi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis. (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Sunyoto, Suyanto. 2011. *Analisis Regresi untuk uji hipotesis*. Yogyakarta. Caps.
- Supriyanto, Heru. 2012. *Peluang dan Tantangan Pengalihan PBB P2 dan BPHTB*, (Online), (<http://www.formasi.com/ind> ex.php?page=showartikel&id=9, diakses Rabu, 1 November 2017).
- Surakarta.go.id/?p=5298(diakses pada Selasa, 5 Juni 2018)
- Syukriy, Abdullah dan Abdul Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintah dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(2).
- Tantomo, Alim Adi. 2011. Analisis Pemungutan Pajak Reklame Tahunan dan Pajak Reklame insidental Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2008-2010. *Tugas Akhir*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Urip, Santoso. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. ISSN: 0216-1249
- Veno, Andri dan Syamsudin. 2016. Analisis Trend Kinerja Keuangan Perbankan syariah tahun 2015 sampai 2017. *Jurnal Ilmiah dan*

- Manajemen Islam*.4(1) .Surakarta. FEB Universitas Muhammadiyah.
- Veronika, Ananda. 2018. Analisis Penerimaan Pajak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2013-2017. *Tugas Akhir*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Wita Ningrum, R, Endang Masitoh dan Riana R.Dewi. 2017. Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklameserta kontribusinya terhadap penerimaan Pajak Dearah. Dalam *EXPLORASI*, XXIX (2). Surakarta. Universitas Islam Batik.
- Waryanti. 2009. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi. Fakultas Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Wicaksono, Hendrawan Adi. 2017. Potensi dan Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Surakarta Tahun 2014-2016. *Tugas Akhir*. Surakarta. Universitas Sebelas maret.
- Widyarti Indrakusuma, Arieayani. 2011. Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang. Fakultas Ekonomi Undip.
- Wijaya, Andriyanto. 2006. Perbandingan Analisis Tren Laporan Keuangan untuk memprediksikan Kinerja Perusahaan dimasa yang Akan Datang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Wulansepty, Dinar Ratna. 2014. Strategi Pemungutan PBB Kota Surakarta Terhadap Realisasi Target Penerimaan Tahun 2009-2012. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.3(10):1-15. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Yunanto, Lilik. 2010. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. *Tesis*. Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret